



Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Kelengkapan Fasilitas Sekolah Menengah Pertama di Kota Semarang

Muhammad Rizki Meidianto¹, Arya Putra Wisnuwardhana²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

Received: 06 Juni 2024

Revised: 13 Juni 2024

Accepted: 20 Juni 2024

Abstrak

With school operational assistance or boss funds from the government, it is hoped that schools that receive this assistance should be able to manage and use it according to the needs that need to be met, such as developing school facilities/infrastructure aimed at making student learning activities more optimal due to complete support. the school facilities. If these types of facilities need to be developed, if they are still lacking, damaged or don't have them at all, the school can develop facilities in the form of a computer lab and its components, repairs to classrooms, tables, chairs, etc. that students need for learning activities. This research also aims to look at the role of the Semarang City Education Office in handling junior high schools in the city of Semarang in implementing government programs in the form of operational funding channels for the school's needs. Apart from that, this research also looks at how schools manage the aid funds from the government that are delivered. by the Department of Education whether it is used to meet these needs. This research uses empirical methods by collecting primary data by conducting interviews with staff from the Education and Culture Department of Semarang City, Central Java. Secondary data collection in this research was obtained through books, articles and scientific journals. The data that has been obtained is analyzed qualitatively from data through interviews and literature studies which are then displayed in narrative form.

Keywords: *Quality, Completeness, Facilities*

(*) Corresponding Author: rizkimeidianto856@gmail.com

How to Cite: Meidianto, M. R., & Wisnuwardhana, A. P. (2024). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Kelengkapan Fasilitas Sekolah Menengah Pertama di Kota Semarang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12541828>

PENDAHULUAN

Dana bantuan operasional sekolah atau dana Bos sudah menjadi program pemerintah dalam menangani sekolah-sekolah yang membutuhkan pengembangan fasilitas sekolah, dan pemenuhan kelengkapan fasilitas bagi sekolah yang menerima dana BOS. adapun dana bantuan ini digunakan misalnya untuk Akuisisi dan perbaikan sarana prasarana bertujuan untuk mencapai standar minimum pelayanan dengan mengembangkan perpustakaan, mengadakan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, mendapatkan peralatan sekolah, serta memanfaatkan laboratorium dan bahan praktik. Dengan demikian, bila lembaga pendidikan memiliki keuangan yang solid, fasilitas penunjang kegiatan belajar siswa dapat dipenuhi secara optimal. Kelengkapan fasilitas belajar yang meningkat akan mempermudah proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang efektif dapat memberikan dampak positif pada siswa, menjadikan mutu sekolah lebih unggul dan berkembang. Hal ini diperkuat dengan penggunaan dana BOS yang sesuai prosedur dan tepat sasaran,



yang berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. dalam hal ini yang menjadi landasan pemikiran utama penelitian ini adalah, pengelolaan dana BOS terhadap fasilitas sekolah Khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di Kota Semarang Jawa Tengah. Proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan efektif jika didukung oleh fasilitas penunjang berkualitas, Sebagai tempat pendidikan sekolah perlu meningkatkan kelengkapan fasilitas guna menjamin kelancaran kegiatan belajar mengajar. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke Sekolah Menengah Pertama khususnya yang dijadikan dasar penelitian kami diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran sekolah. Pemimpin sekolah, sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dan otoritas, diharapkan dapat menggunakan dana tersebut secara optimal sesuai dengan kebutuhan sekolah, dengan memprioritaskan pemenuhan fasilitas yang dibutuhkan. Agar tercipta sistem pendidikan yang bermutu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab dalam merancang program-program untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu inisiatif yang diambil adalah implementasi Biaya Operasional Sekolah (BOS), suatu program pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk menyediakan dana operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Di Indonesia, pendidikan menjadi suatu kebutuhan masyarakat yang sangat vital karena dapat mendukung kemakmuran mereka. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan telah meningkat, mengingat pendidikan dianggap sebagai salah satu bentuk investasi untuk menghadapi masa depan. Tingkat ketersediaan dan distribusi pendidikan di suatu negara mencerminkan sejauh mana pemerintah memberikan pelayanan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Jika pendidikan mudah diakses dan merata, hal itu menandakan bahwa negara tersebut dapat dianggap sejahtera; sebaliknya, jika pendidikan sulit diakses dan tidak merata, dapat diartikan bahwa pemerintah kurang memperhatikan pentingnya pendidikan bagi masyarakatnya. Dari pemaparan diatas dapat ditarik rumusan masalah yaitu bagaimana upaya dalam pengelolaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas kelengkapan fasilitas Sekolah Menengah Pertama di Kota Semarang dan faktor pendukung dan penghambat implementasi program upaya peningkatan kelengkapan fasilitas Sekolah Menengah Pertama di Kota Semarang.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang pada 31 Oktober 2023. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber buku, artikel dan jurnal ilmiah. Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dari data melalui wawancara dan studi literatur yang kemudian ditampilkan dalam bentuk narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya peningkatan kualitas kelengkapan fasilitas Sekolah Menengah Pertama di Kota Semarang

Secara umum edukasi pemasyarakatan penggunaan dana BOS yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Semarang terlaksana dengan baik dengan melibatkan seluruh kepala sekolah dan bendahara BOS masing-masing sekolah minimal setahun sekali. Dalam pertukaran tersebut, pedoman teknis BOS dibahas dan anak-anak menjadi fokusnya, namun Dinas Pendidikan tidak memberikan informasi konkrit mengenai penggunaan dana BOS untuk pelatihan guru atau fasilitas sekolah. Sosialisasi juga akan dilakukan sesuai pedoman berdasarkan kebutuhan unik masing-masing sekolah.¹

Sekolah mempunyai kebebasan untuk memutuskan bagaimana mengalokasikan dana untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan seluruh pemangku kepentingan sekolah harus dilibatkan dalam bentuk sumbangan dan saran. Keputusan ini akan dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas sekolah serta dicatat dalam dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Meskipun penuh tanggung jawab bagi pihak sekolah, mereka harus tetap mematuhi pedoman yang diatur dalam Juknis BOS. Tidak ada persentase minimum atau maksimum yang ditentukan oleh Juknis BOS untuk pengembangan guru. Asalkan pihak sekolah setuju, mereka dapat melaksanakan kegiatan tersebut tanpa hambatan. Namun, sekolah hanya dapat melaksanakan kegiatan sekitar empat kali dalam setahun. Pembatasan ini disebabkan oleh kebijakan pembagian dana BOS yang harus dilakukan dengan bijak untuk semua kegiatan, selain pengembangan guru. Penggunaan dana BOS dibagi menjadi dua kategori utama untuk fasilitas sekolah, yaitu belanja barang dan jasa. Ini mencakup langganan daya dan jasa, pemeliharaan, serta perawatan sarana dan prasarana. Saat mempertimbangkan belanja barang dan jasa, pihak sekolah harus memeriksa kondisi fasilitas sekolah. Hal ini memudahkan alokasi dana BOS untuk perbaikan dan pemeliharaan fasilitas, karena semua pihak di sekolah dapat langsung melihat kondisi fasilitas tersebut. Di sisi lain, alokasi dana untuk belanja modal, seperti komputer, LCD, dan laptop, harus terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Pihak sekolah perlu memastikan bahwa barang yang dibeli dapat mendukung kegiatan pembelajaran dan manajemen sekolah. Selain itu, pihak sekolah memiliki kewajiban untuk mencatat semua barang yang dibeli menggunakan dana BOS sebagai inventaris sekolah. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktercapaian tujuan pengelolaan dana masih banyak, di antaranya adalah: pertama, dalam aspek perencanaan, jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada sekolah dianggap masih kurang memadai jika dibandingkan dengan besarnya biaya operasional yang harus ditanggung oleh sekolah. Kedua, dalam aspek pelaksanaan, meskipun penggunaan anggaran telah sesuai dengan pedoman yang ada, kurangnya sosialisasi

¹Refgi, Margaretha, MS. IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH(BOS) UNTUK PENGEMBANGAN GURU DAN FASILITAS SEKOLAH DI SMP KOTA SEMARANG. 2019. Hlm.4

kepada orang tua menyebabkan banyak pihak memiliki pemahaman yang keliru terkait dengan masalah dana BOS.

Secara menyeluruh, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilandasi oleh kesepakatan dan penentuan bersama antara kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Pihak-pihak tersebut harus didaftarkan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dana BOS mendukung aspek kegiatan, antara lain penerimaan siswa baru, pembelian buku pelajaran, pendanaan kegiatan pembelajaran, pengayaan, olah raga, seni, akademik, kependuan dan Palang Merah Remaja, ulangan harian, ulangan umum, dan ujian keluar. Selain itu, dana BOS dapat dipakai untuk membeli perlengkapan dan perlengkapan sekolah seperti listrik, air, telepon, dan biaya kecil pemeliharaan gedung. Perlu ditegaskan bahwa dana BOS tidak boleh disimpan dalam jangka waktu lama untuk tujuan memperoleh bunga, dipinjamkan kepada orang lain, atau digunakan untuk membayar premi asuransi, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan siswa. Selain itu, dana BOS tidak boleh digunakan untuk renovasi atau pembangunan gedung yang mahal, dan jika terjadi perubahan dan sekolah tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima dana BOS, atau jika sekolah ditutup, subsidi harus dikembalikan ke kas negara.

Dana BOS akan digunakan untuk melengkapi sekolah dengan peralatan lengkap. Sekolah yang didanai BOS akan dapat membeli dan memperbaiki sarana prasarana untuk mencapai standar pelayanan minimal melalui penyediaan perpustakaan, kegiatan akademik dan ekstrakurikuler, pengadaan peralatan sekolah, serta penggunaan laboratorium dan bahan praktik. Oleh karena itu, apabila suatu sekolah mempunyai kemampuan keuangan yang memadai, maka sekolah dapat menyediakan fasilitas keseluruhan yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar siswa. Semakin baik fasilitas pembelajaran maka kegiatan pembelajaran akan semakin mudah. Kegiatan pembelajaran yang baik menimbulkan kesan positif pada siswa dan meningkatkan mutu sekolah. Selain itu, didukung dengan penggunaan dana BOS yang prosedural dan tepat sasaran, kualitas sekolah dapat ditingkatkan.

Berdasarkan wawancara dengan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang, Pak Yudha menyampaikan bahwa, pada mulai tahun 2020, pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang sudah mulai merencanakan untuk membuat program dalam rangka melengkapi fasilitas Sekolah Menengah Pertama di Kota Semarang melalui sebuah program yang disebut *Masterplan*. Masterplan merupakan perencanaan tata ruang yang memberikan gambaran dan hasil proyek yang sudah direncanakan. Masterplan kawasan pendidikan Kota Semarang sampai tahun ini sudah berjalan di beberapa SMP di Kota Semarang seperti SMP N 13, SMP N 37, SMP N 41, SMP N 16, SMP N 23, SMP N 23, 24, SMP N 35 di Kota Semarang. Perencanaan penataan yang dilakukan oleh pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Semarang meliputi berbagai fasilitas penting SMP di Kota Semarang seperti kelengkapan belajar mengajar, kemudian pembenahan kamar mandi sekolah yang sudah rusak atau tidak layak pakai, kemudian pembenahan lapangan dan gedung sekolah yang sudah rusak, kemudian pembenahan dan perluasan lahan parkir sekolah, bahkan setiap sekolah yang telah tergabung dalam program Materplan ini, sekolah-sekolah tersebut telah dibangun lapangan mini soccer bagi sekolah yang memiliki lahan

luas untuk dibuatkan mini soccer ini. Tetapi untuk pembangunan mini soccer ini tidak dilakukan di semua sekolah yang tergabung dalam Masterplan karena terbatasnya lahan sekolah.

Disampaikan juga oleh Pak Yudha bahwa, dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang berencana untuk merenovasi dan membuat beberapa sekolah SMP yang tergabung dalam Masterplan untuk membuat letak bentuk sekolah menjadi letter U, dengan tujuan agar segala kegiatan dan aktivitas siswa terpusat dalam satu tempat dan guru pun bisa mengetahui dan mengawasi segala aktivitas siswa.

Program Masterplan ini dirasa menjadi salah satu langkah awal untuk menuju ke dunia pendidikan yang lebih baik di Kota Semarang. Dengan adanya berbagai terobosan yang diciptakan dan diwujudkan dalam Masterplan ini, telah membuat berbagai SMP di Kota Semarang saat ini terlihat lebih maju dengan berbagai fasilitas sekolah yang lebih maju. Sedangkan untuk SMP swasta di Kota Semarang tidak mengikuti program Masterplan ini, dikarenakan sekolah-sekolah swasta di Kota Semarang diberikan hak dan kewenangan penuh untuk mengelola sekolahnya sendiri. Dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang hanya memberikan bantuan berupa dana yang dimana bantuan tersebut kemudian dikelola sendiri oleh masing masing sekolah swasta di Kota Semarang.

Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk fasilitas sekolah memiliki manfaat signifikan dalam memastikan agar kondisi fasilitas di sekolah tetap terjaga dan dapat terus digunakan oleh seluruh pihak di dalam lingkungan sekolah. Hal ini mencakup pemeliharaan sarana dan prasarana, serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar, seperti kegiatan e-learning di sekolah. Pentingnya dana BOS juga terlihat dalam pengadaan peralatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran, terutama dalam era modern ini di mana sekolah memerlukan sejumlah unit komputer untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Unit komputer yang dibiayai oleh dana BOS juga dapat digunakan untuk melaksanakan Asesmen Nasional secara mandiri. Selain itu, penggunaan dana BOS tidak hanya bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran, tetapi juga dapat mendukung kegiatan manajemen sekolah, seperti implementasi e-rapot yang memudahkan para guru dalam memproses nilai peserta didik. Karena jika ditarik kebelakang, masih ada beberapa sekolah-sekolah yang mereka tidak memiliki lab komputer sendiri untuk siswanya mengikuti ujian pada saat itu, sehingga siswa siswanya diharuskan untuk mengikuti ujian ditempat sekolah lain yang memiliki fasilitas komputer lengkap.

Dengan adanya program masterplan ini, diharapkan sekolah-sekolah yang tidak memiliki fasilitas lab komputer lengkap dapat menggunakan lab komputer yang telah diberikan oleh Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Semarang. Sehingga, saat ini sekolah-sekolah tidak perlu lagi membuat siswanya harus mengikuti ujian atau kegiatan yang menggunakan basis komputer untuk datang ke tempat lain

2. Faktor pendukung dan penghambat program peningkatan kualitas kelengkapan fasilitas Sekolah Menengah Pertama di Kota Semarang

Faktor standar dan tujuan kebijakan berperan penting dalam penggunaan dana BOS untuk meningkatkan fasilitas sekolah. Ketentuan yang dituangkan dalam Pedoman Teknis BOS memberikan pedoman yang jelas yang memungkinkan sekolah mana pun menggunakan dana tersebut untuk tujuan tersebut tanpa melanggar peraturan. Komunikasi juga menjadi elemen penting dalam penggunaan dana BOS untuk mengembangkan fasilitas sekolah. Sebagai lembaga pelaksana tingkat kota, Dinas Pendidikan Kota Semarang memberikan kesempatan komunikasi berkelanjutan kepada setiap sekolah, mulai dari pertukaran hingga rencana dan perubahan penggunaan dana BOS. Departemen kami selalu tersedia untuk konsultasi.

Dalam lingkungan sekolah, komunikasi internal juga menjadi pendorong utama. Setiap pihak, termasuk guru, memiliki hak yang sama untuk menyampaikan saran terkait penggunaan dana BOS untuk pengembangan fasilitas sekolah. Karakteristik badan pelaksana turut menjadi faktor penunjang dalam pemanfaatan dana BOS untuk pengembangan fasilitas sekolah. Inisiatif yang berasal dari sekolah memiliki dampak besar terhadap keputusan menggunakan dana BOS untuk dua tujuan tersebut. Kepala sekolah, khususnya, memiliki peran sentral dalam menentukan alokasi dan penggunaan dana tersebut. Disisi lain kondisi dan sikap yang baik dari Dinas Pendidikan yang selalu mendukung dengan apa yang diputuskan oleh sekolah termasuk penggunaan dana BOS untuk guru dan fasilitas sekolah ini juga mempengaruhi keputusan sekolah dalam menggunakan dana BOS.²

Adapun menurut Pak Yudha selaku staf dinas Pendidikan Kota Semarang yang kami wawancarai beliau mengatakan ada faktor lain yang dapat mendukung untuk pengembangan, kelengkapan fasilitas sekolah menengah pertama yang berada di kota Semarang adapun pak yudha mengatakan seperti sekolah swasta yang mengirimkan proposal terhadap Dinas Pendidikan Kota Semarang proposal tersebut yang dibidang pak yudha berisikan perbaikan ruang kelas, toilet dan penambahan Lab komputer karena setiap tahunnya terdapat permintaan untuk pengembangan fasilitas sarana dan prasarana dari sekolah yang mengirimkan proposal tersebut terhadap Dinas Pendidikan, maka anggaran dapat di salurkan terhadap sekolah yang bersangkutan untuk pengembangan fasilitas di sekolah tersebut.

Adapun bagi sekolah negeri yang dikatakan pak yudha jika terdapat sekolah negeri yang mampu untuk membangun/menambahkan fasilitas sekolah itu sendiri pihak dinas pendidikan pun tetap memberi dana bantuan karena sebagaimana yang dijelaskan oleh pak Yudha setiap tahun terdapat kerusakan komputer, komponen komputer yang sudah ketinggalan, dari pihak dinas nya pun tetap memperbaiki/mengganti dari PC/komputer tersebut. namun jika terdapat keterbatasan anggaran pihak dinas pun membagi rata untuk memperbaiki kerusakan tersebut dengan pihak semua sekolah negeri yang mengajukan kepada dinas pendidikan Kota Semarang. Hambatan utama dalam pemanfaatan dana BOS untuk peningkatan kualitas guru dan fasilitas sekolah adalah kurangnya evaluasi oleh

²Refgi, Margaretha, MS. IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH(BOS) UNTUK PENGEMBANGAN GURU DAN FASILITAS SEKOLAH DI SMP KOTA SEMARANG. 2019. Hlm.9

Dinas Pendidikan Kota Semarang terhadap kinerja sekolah. Selain itu, ketiadaan kewajiban dan penghargaan kepada sekolah juga menjadi faktor penghambat, yang seharusnya menjadi dorongan untuk menggunakan dana BOS dengan lebih optimal. Dampaknya adalah tidak semua sekolah memanfaatkan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah.

Hambatan dalam menerapkan penggunaan dana BOS untuk pengembangan fasilitas sekolah di SMP Kota Semarang melibatkan beberapa aspek, termasuk standar dan tujuan kebijakan. Dinas Pendidikan Kota Semarang menjadi kendala utama karena tidak memberikan evaluasi dan tanggung jawab yang jelas terkait penggunaan dana BOS oleh sekolah. Ini mengakibatkan ketidakjelasan dalam menilai sejauh mana dana BOS dimanfaatkan secara efektif atau tidak, serta kurangnya insentif berupa penghargaan kepada sekolah yang berhasil memenuhi semua aspek penggunaan dana BOS. Selain itu, ketidakpatuhan pihak sekolah dalam menggunakan dana BOS untuk operasional sekolah juga menjadi hambatan, karena ketaatan yang berlebihan dapat mengurangi inisiatif dalam memenuhi aspek-aspek lainnya dari program BOS. Karakteristik badan pelaksana juga menjadi faktor penghambat, di mana tidak semua sekolah memiliki inisiatif untuk memenuhi semua aspek yang diperlukan dalam penggunaan dana BOS untuk meningkatkan fasilitas sekolah.³

Evaluasi program adalah proses menentukan apakah suatu program konsisten dengan tujuannya, mulai dari pelaksanaan program hingga hasil dan dampak program. Akses terhadap bantuan operasional sekolah (BOS) adalah kemampuan seorang administrator atau manajer dalam mengorganisasikan masukan-masukan yang bersifat instrumental (komponen pendidikan) agar prosesnya dapat berjalan sesuai tujuan, dan penggunaan sumber daya serta dana BOS memerlukan penggunaan yang efektif dan efisien. Penggunaan infrastruktur, kurikulum dan manajemen di sekolah. Selain dukungan dan bahasa yang jelas untuk lembaga pendidikan oleh pemerintah.⁴

Dinas Pendidikan juga tidak menyatakan bahwa memenuhi aspek ini merupakan kewajiban bagi setiap sekolah, dan tidak semua sekolah melibatkan biaya untuk hal ini. Batasan minimum dan maksimum untuk alokasi dana BOS dalam pembenahan dan pemeliharaan fasilitas sekolah membuat penggunaan dana BOS untuk aspek ini cenderung mencapai rata-rata sekitar 15% dari total anggaran. Sementara itu, regulasi Juknis BOS telah mengatur jumlah maksimal dan harga tertentu untuk pengadaan peralatan pembelajaran setiap tahunnya. Hal ini bertujuan agar pengeluaran sekolah terkait pengadaan peralatan pembelajaran dapat diawasi. Berdasarkan informasi dari berbagai pihak, peneliti berpendapat bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak melakukan penilaian terkait penggunaan dana BOS tersebut. Dinas juga tidak memberikan penghargaan kepada sekolah yang mematuhi semua aspek penggunaan dana BOS. Dinas Pendidikan dapat melaksanakan penilaian atau memberikan insentif agar sekolah dapat lebih optimal

³Refgi, Margaretha, MS. IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH(BOS) UNTUK PENGEMBANGAN GURU DAN FASILITAS SEKOLAH DI SMP KOTA SEMARANG. 2019. Hlm.12

⁴Sri, Hadiyanto, Yulianto. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. 2019.hlm. 4

dalam memanfaatkan dana BOS untuk semua aspek, termasuk pengembangan guru dan perbaikan fasilitas sekolah.⁵

Komunikasi juga berperan penting dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas guru dan fasilitas sekolah. Sebagai pelaksana di tingkat kota, Dinas Pendidikan Kota Semarang senantiasa memberikan kesempatan komunikasi kepada setiap sekolah, mulai dari pertukaran hingga rencana dan perubahan penggunaan dana BOS. Segala bentuk komunikasi, termasuk pertukaran, rencana, perubahan, dan saran, ditangani dengan sangat hati-hati oleh departemen. Selain itu, komunikasi di dalam sekolah juga akan menjadi pendorong utama, karena semua pemangku kepentingan, termasuk guru, mempunyai hak yang sama untuk memberikan saran mengenai bagaimana dana BOS sebaiknya digunakan untuk mengembangkan guru dan fasilitas sekolah. Fasilitas yang dimiliki lembaga pelaksana juga berperan dalam mendukung peningkatan kualitas dengan menggunakan dana BOS guru dan fasilitas sekolah. Inisiatif yang diambil oleh sekolah memiliki dampak besar dalam menentukan apakah dana BOS akan digunakan untuk tujuan tersebut atau tidak. Kepala sekolah, khususnya, memiliki peran sentral dalam mengalokasikan dan mengelola dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Selain itu, hal penting lainnya adalah semua warga negara mempunyai hak yang sama atas pendidikan berkualitas. Warga negara dengan disabilitas fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Demikian pula, penduduk di daerah terpencil dan berkembang, serta masyarakat adat terpencil, mempunyai hak atas pendidikan khusus. Untuk melindungi hak-hak warga negara, pemerintah pusat dan daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan dan fasilitas serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan daerah mempunyai kewajiban untuk menjamin pendanaan bagi pendidikan seluruh warga negara yang berusia antara 7 dan 15 tahun.⁶

Proses pendidikan sebenarnya memerlukan sarana dan prasarana. Di sisi lain, sarana dan prasarana semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Begitu produk tiba, kualitas produk berikutnya akan menurun. Tanpa pemeliharaan yang baik, sarana dan prasarana pendidikan akan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas yang signifikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk terus memelihara sarana dan prasarana pendidikan. Pemeliharaan merupakan kegiatan pengelolaan dan penataan untuk memastikan seluruh barang selalu dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara efisien dan tepat. Pemeliharaan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk melindungi dan mencegah kerusakan. Pemeliharaan

⁵http://eprints.undip.ac.id/75988/5/BAB_IV.pdf

⁶Arwildayanto, Nina, Warni. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan. Widya Padjajaran. Gorontalo. 2017. Hlm. 44

mencakup semua upaya berkelanjutan untuk menjaga peralatan dalam kondisi baik.⁷

Menurut visi tersebut, tujuan dari sistem pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan keterampilan, membentuk karakter, dan meningkatkan peradaban bangsa agar mencapai martabat yang tinggi. Hal ini dilakukan dengan maksud mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan agar peserta didik dapat mengoptimalkan potensinya, menjadi individu yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Kehadiran masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat mencakup partisipasi dalam pengembangan kurikulum, pelaksanaan, evaluasi pendidikan, pengelolaan dan keuangancocok dengan standar nasional pendidikan. Pendanaan pendidikan berbasis masyarakat dapat diberikan oleh penyelenggara, pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sumber lain, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Institusi pendidikan berbasis komunitas menerima akses yang adil dan setara terhadap bantuan teknis, hibah keuangan, dan sumber daya lainnya dari pemerintah federal dan lokal. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran guna meningkatkan prestasi akademik dan prestasi pendidikan guru yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Rincian anggaran peningkatan kemampuan akademik dan kualifikasi guru akan ditentukan oleh peraturan pemerintah.

Untuk melaksanakan UU Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah telah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan. Secara teknis peraturan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan. Standar ini mencakup pengaturan pendanaan pendidikan dan terdiri dari tiga jenis utama: Belanja modal untuk pengadaan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasional, termasuk gaji dan tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, bahan atau peralatan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tidak langsung. Biaya pribadi meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan peserta didik selama menempuh studi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah dibuat dapat ditarik kesimpulan bahwa, penggunaan dana BOS yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah dijalankan dengan baik. Mulai dari pengalokasian dana hingga ke penerapan rancangan yang dilakukan sudah hampir mencapai target. Semakin lengkap dan bermutu untuk sarana pembelajaran, semakin mudah pelaksanaan kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang efektif dapat memberikan dampak positif kepada siswa dan meningkatkan mutu sekolah secara signifikan. Hal ini diperkuat

⁷barsani, muchran,asri. ANALISIS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KELENGKAPAN FASILITAS SEKOLAH DI SMP NEGERI 3 MAKASSAR. 2018. Hlm. 21

dengan pemanfaatan dana BOS yang dipergunakan sesuai prosedur dan dengan tepat sasaran.

Dengan adanya program Masterplan yang direncanakan dan sudah dilaksanakan oleh pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang ini telah menunjukkan hasil bahwa SMP Negeri di Kota Semarang saat ini sudah mulai mengalami kemajuan fasilitas yang cukup signifikan di beberapa sekolah. Fasilitas tersebut meliputi berbagai fasilitas penting SMP di Kota Semarang seperti kelengkapan belajar mengajar, kemudian pembenahan kamar mandi sekolah yang sudah rusak atau tidak layak pakai, kemudian pembenahan lapangan dan gedung sekolah yang sudah rusak, kemudian pembenahan dan perluasan lahan parkir sekolah, bahkan setiap sekolah yang telah tergabung dalam program Masterplan ini, sekolah-sekolah tersebut telah dibangun lapangan mini soccer bagi sekolah yang memiliki lahan luas untuk dibuatkan mini soccer ini. Tetapi untuk pembangunan mini soccer ini tidak dilakukan di semua sekolah yang tergabung dalam Masterplan karena terbatasnya lahan sekolah.

Program Masterplan ini dirasa menjadi salah satu langkah awal untuk menuju ke dunia pendidikan yang lebih baik di Kota Semarang. Dengan adanya berbagai terobosan yang diciptakan dan diwujudkan dalam Masterplan ini, telah membuat berbagai SMP di Kota Semarang saat ini terlihat lebih maju dengan berbagai fasilitas sekolah yang lebih maju. Program Masterplan ini juga merupakan hasil bahwa pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk fasilitas sekolah memiliki manfaat signifikan dalam memastikan agar kondisi fasilitas di sekolah tetap terjaga dan dapat terus digunakan oleh seluruh pihak di dalam lingkungan sekolah. Hal ini mencakup pemeliharaan sarana dan prasarana, serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar untuk seluruh SMP Negeri di Kota Semarang.

Dengan adanya program Masterplan dari pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang ini, diharapkan dapat menjadi salah satu bukti faktor kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, dengan semakin lengkap dan berkualitasnya sarana dan prasarana fasilitas sekolah - sekolah di Kota Semarang. Diharapkan bagi sekolah - sekolah yang belum mengikuti program Masterplan ini dapat segera terjangkau oleh pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang, supaya sekolah - sekolah negeri di Kota Semarang segera mendapatkan alokasi bantuan Dana Bantuan Operasional Sekolah melalui program Masterplan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwildayanto, Nina, Warni. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan. Widya Padjajaran. Gorontalo. 2017. Hlm. 44
- Barsani, Muchran, Asri. ANALISIS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KELENGKAPAN FASILITAS SEKOLAH DI SMP NEGERI 3 MAKASSAR. 2018. Hlm. 21
- http://eprints.undip.ac.id/75988/5/BAB_IV.pdf
- Refgi, Margaretha, MS. IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH(BOS) UNTUK PENGEMBANGAN GURU DAN FASILITAS SEKOLAH DI SMP KOTA SEMARANG. 2019. Hlm.4

- Refgi, Margaretha, MS. IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH(BOS) UNTUK PENGEMBANGAN GURU DAN FASILITAS SEKOLAH DI SMP KOTA SEMARANG. 2019. Hlm.9
- Refgi, Margaretha, MS. IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH(BOS) UNTUK PENGEMBANGAN GURU DAN FASILITAS SEKOLAH DI SMP KOTA SEMARANG. 2019. Hlm.12
- Sri, Hadiyanto, Yulianto. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. 2019.hlm. 4